



PENGARUH TRANSPARANSI, KOMPETENSI, DAN SPI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BPKAD PAPUA

Yustina Ribka Manggaprouw^{1*}, Ratna Angraini², Muhammad Yusuf³
^{1,2,3} Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

ABSTRACT

This study attempts to ascertain the impact of transparency, competence, and internal control systems on financial management accountability at the BPKAD Papua. This research uses secondary data collected through questionnaires with financial management employees using purposive sampling techniques, thereby obtaining a population of 45 people. The data analysis of this study used multiple linear regression with an ordinary least squares (OLS) approach using SPSS 23 software. The research results show that partially transparency has a positive and significant effect on regional financial management accountability, while competence and the internal control system do not have a significant effect. then simultaneously these three independent variables have a positive and significant effect on regional financial management accountability. Due to the minimal number of research samples, further research can increase the number and variety of samples so that the results obtained are stronger and more effective.

Keywords: *Transparency, Competence, Internal Control System, Financial Management Accountability*

How to Cite:

Manggaprouw, Y. R., Angraini, R., & Yusuf, M., (2025). Pengaruh Transparansi, Kompetensi, dan SPI Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada BPKAD Papua, Vol. 6, No. 3, hal 458-474.

PENDAHULUAN

Saat ini Indonesia sedang menjalani era reformasi, yang berarti laporan keuangan harus dibuat oleh pemerintah untuk keuntungan eksternal internal dan eksternal. Laporan keuangan pemerintah harus lengkap agar dapat diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut Mudjiyono dan Yetti (2019), Akuntabilitas pemerintah pusat dan daerah harus ditingkatkan dalam pengelolaan penyusunan laporan keuangan yang lengkap, dan akuntabel.

Laporan akuntabilitas keuangan pemerintah yang tepat waktu dan didukung oleh bukti administratif dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mengatur sistem yang digunakan untuk mengelola keuangan daerah. Selain itu, hasil penelitian badan pemeriksa keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2020 menunjukkan bahwa jumlah opini wajar tanpa pengecualian (WTP) telah menurun. Temuan ini disebabkan karena tidak optimalnya pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran. Adapun permasalahan lainnya yang terjadi yaitu ditemukan berbagai kasus korupsi di Indonesia.

Hal ini ditunjukkan pada kasus yang terjadi di pemerintahan Provinsi Papua. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Papua LE sebagai tersangka dalam kasus pencucian uang terkait penanganan proyek infrastruktur dan kasus korupsi lainnya. (Irdan, Jamiluddin & Resta, kpk.go.id, 2022).

Selain itu terdapat kasus berjamaah anggota legislatif yaitu kasus zumi zola yang dimana kpk tetapkan 28 DPRD jambi sebagai tersangka pada kasus suap. (Febriyan, tempo.co 2023) dan kasus korupsi dana hibah yang dilakukan lembaga DPRD paniai tahun 2018 yang melibatkan 14 tersangka. Hal ini menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan internal terhadap pengelolaan keuangan negara (Budi Santosa, antaranews.com, 2022)

Berdasarkan surat BPK perihal Hasil Baban Pemeriksa Keuangan (BPK) telah ditemukan bahwa terdapat 14.501 masalah yang menyebabkan kerugian total 8,37 triliun rupiah. Hasilnya mencakup 6.617 (46%) masalah kelemahan yang terkait dengan Sistem Pengendalian Intern (SPI), 7.512 (52%) masalah tidak mematuhi peraturan, dan 372 (2%) masalah ketidakefektifan, tidak efisien dan tidak hemat

Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran pemerintah setiap tahun semakin tidak terawasi, baik ditingkat pusat maupun daerah. Hal ini berpotensi melanggar hak-hak sosial dan ekonomi serta menghambat kemajuan bangsa. Untuk itu, pengelolaan keuangan negara harus lebih transparan, profesional dan bertanggung jawab.

Adapun faktor dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan, transparansi diperlukan pada instansi pemerintah untuk mempublikasikan laporan keuangan bagi kepentingan masyarakat. Selain itu, Transparansi merupakan kebebasan masyarakat dalam mengetahui aktivitas pengelolaan keuangan dan memberikan informasi penggunaan anggaran secara terbuka diperlukan untuk mencegah terjadinya kecurangan (Nila & Munari, 2023).

Selain itu, Transparansi dalam pelaporan keuangan dan proses penganggaran meningkatkan akuntabilitas. walaupun ada beberapa kekurangan dalam hal transparansi, praktik keuangan tetap akuntabel. sehingga pentingnya keterlibatan publik dan pelaporan yang jujur secara tepat waktu

dapat meningkatkan akuntabilitas. (Timothy et.al, 2023). Hasil penelitian Ria, Taufeni & Azwir (2021), Nila & Munari (2023), Ulfi & Erly (2023) dan Ridha, Restu & Julita (2021) menemukan bahwa Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berkorelasi. Hasil studi tidak sesuai dengan penelitian seperti Prilya dan Fitri (2020), Nanda Saril (2021), Novanda, Yuliani, dan Mranani (2024), serta Ratih dan Fitri (2023) yang menunjukkan bahwa Transparansi tidak berkorelasi dengan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Karena pemerintah tidak transparansi dalam memberikan informasi tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Namun, jika Kompetensi ASN tidak memahami hal ini, laporan keuangan akan dibuat dengan kesalahan dan tidak sesuai dengan standar pemerintah, sehingga masyarakat menjadi mendapatkan informasi yang salah dan mempengaruhi pengambilan keputusan. Oleh karena itu, akuntabilitas pengelolaan keuangan akan meningkat seiring dengan tingkat keterampilan yang dimiliki aparatur pemerintah (Siti et.al, 2020). Temuan tersebut sesuai dengan temuan oleh Ria, Taufeni dan Azwir (2021) dan Dwi Fitri & Rizky (2020) menemukan Kompetensi berpengaruh meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Meskipun demikian, temuan yang dilakukan oleh Sahala, Rintan, dan Tika (2022); Sweeteni et al. (2019); serta Putri dan Sari (2024) yang menunjukkan bahwa kompetensi tidak berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan keuangan. Hal ini menunjukkan jika kompetensi diterapkan dengan buruk, maka dapat berdampak akuntabilitas pemerintah.

Pemerintah bertanggung jawab untuk menerapkan sistem pengendalian internal di seluruh pemerintahan pusat dan daerah untuk mencegah penyalahgunaan laporan keuangan. Hal ini sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, yang mengatur Pemerintah dapat mengoptimalkan kinerja laporan keuangan dengan sistem pengendalian internal (Mahmudi, 2016). Sejalan dengan hasil penelitian Zeny, Yunika & Hafifah (2020), Dwi & Rizky (2020) dan Sarah, Henny & Perseveranda (2023) mengindikasikan bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Meningkat dengan sistem pengendalian internal. Namun, penelitian yang dilakukan Wulan dan Deddy (2020), mengemukakan bahwa Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Kondisi ini muncul karena adanya penetapan batas dan toleransi penilaian risiko.

Berdasarkan latar belakang masalah, terlihat bahwa hasil penelitian sebelumnya tidak konsisten mengenai berbagai komponen yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan. Selain itu, hasil beberapa penelitian berbeda. Menurut Firdianto & Sudiyanto (2020) penelitian perlu dieksplorasi untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan konklusif tentang komponen yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua. Badan ini bertanggung jawab atas perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan evaluasi anggaran serta aset daerah dalam penyusunan dan pelaporan keuangan yang efektif, transparan, dan akuntabel untuk membantu pembangun wilayah dan kemakmuran masyarakat.

Dengan demikian, maka penulis dapat menjadikan permasalahan ini sebagai dasar untuk melakukan pengujian hipotesis secara kuantitatif dalam penelitian skripsi dengan judul **“Pengaruh Transparansi, Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua.**

TINJAUAN TEORI

Teori Agensi

Dalam teori keagenan, prinsipal memberikan kepada agen wewenang untuk bertindak atas nama prinsipal dan memberikan instruksi atau otoritas kepada agen untuk melakukan tugas tertentu atau melakukan pengambilan keputusan yang optimal bagi prinsipal (Jensen & Meckling, 1976).

Selain itu, Teori Agensi (agency theory) merupakan kerangka kerja yang membantu dalam hubungan antara pihak yang melaksanakan agen dan pihak yang mendelegasikan pekerjaan kepada prinsipal (Yanuar Krina, 2022). Untuk mengetahui bagaimana, variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan berhubungan peneliti menggunakan teori agensi.. Dengan demikian, teori keagenan digunakan secara kontekstual untuk menemukan hubungan antara variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut purnama sari, setia mulyani dan setyo (2020), akuntabilitas pengelolaan keuangan adalah proses yang dilakukan pemerintah daerah untuk memberikan informasi dan pengungkapan mengenai kegiatan keuangan kepada pihak berkepentingan. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan kepercayaan serta sebagai bentuk pengelolaan pertanggungjawaban laporan keuangan. Selain itu, akuntabilitas mencakup penyediaan laporan keuangan yang lengkap dengan sesuai standar akuntansi pemerintah yang berlaku, sehingga pengguna laporan dapat memahami pengelolaan keuangan daerah yang transparansi dan akuntabel.

Transparansi

Menurut Ria, Taufeni, & Azwir (2021), Transparansi didefinisikan sebagai faktor yang memberikan kontribusi positif pada peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan. Transparansi mengacu pada keterbukaan dalam pengelolaan anggaran yang memungkinkan dana public digunakan dengan tepat dan legal sesuai dengan tujuan yang yang ditentukan. Sehingga transparansi pengelolaan keuangan semakin baik juga akuntabilitas yang dihasilkan.

Selain itu dalam penelitian Nila Aulia & Munari (2023), menyatakan bahwa transparansi adalah aspek penting yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan. Transparansi dalam konteks penelitian ini didefinisikan sebagai keterbukaan pemerintahan dalam menyampaikan informasi terkait pengelolaan dana kepada masyarakat. Hal ini dapat melibatkan penyediaan informasi yang jelas, lengkap dan mudah diakses tentang perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan keuangan desa.

Kompetensi

Kompetensi ini mencakup berbagai aspek yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang optimal dalam konteks tertentu (Sugiyono, 2020). Selain itu, kompetensi didefinisikan oleh McClelland sebagai sifat yang dimiliki seseorang dapat berdampak langsung pada kinerja yang sangat baik. Selain itu, kompetensi adalah tindakan yang dilakukan oleh performer luar biasa lebih sering mencapai hasil yang lebih baik daripada performer biasa (Zainal et.al, 2015).

Berdasarkan hasil penelitian Ria, Taufeni dan Azwir (2021), kompetensi berperan penting untuk akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan dengan kompetensi yang memadai dapat memahami dan menerapkan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang lebih efektif. Sehingga, hal ini dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah karena pengelola keuangan yang kompeten dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan standar transparansi dan kompetensi. Menurut Penelitian Fitri dan Agung (2020) serta Njoasi, Grace, dan Hendrik (2019), mengemukakan bahwa kompetensi adalah kemampuan tata kelola pemerintahan daerah dalam melaksanakan kewajiban dan wewenangnya dalam pengelolaan keuangan.

Sistem Pengendalian Internal

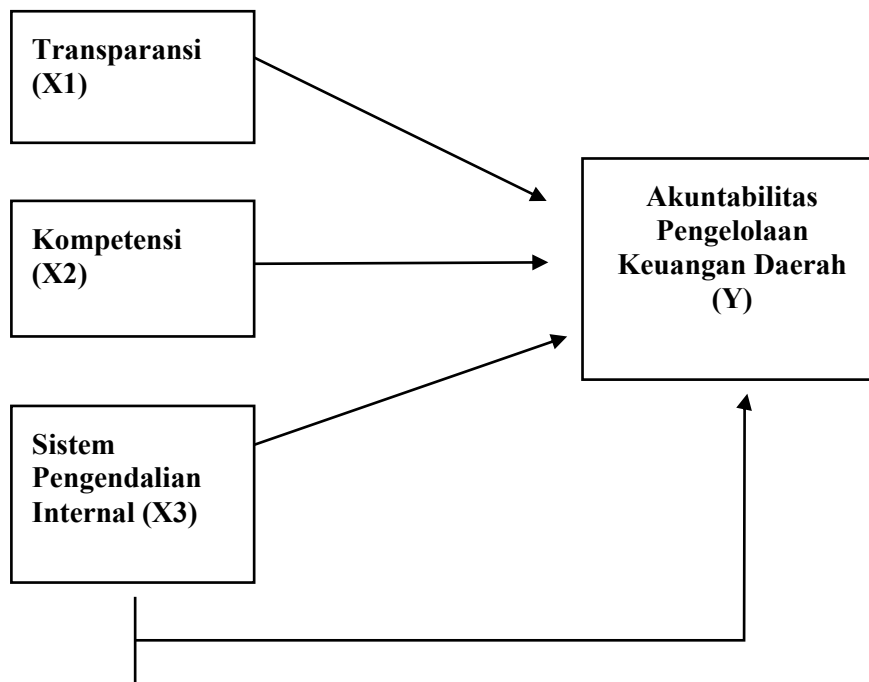
Menurut PP No.60 tahun 2008, “sistem pengendalian intern adalah proses yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang akurat, pengamanan aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan”. Selain itu, Mulyadi (2017) Menyatakan bahwa setiap organisasi harus memiliki sistem pengendalian internal untuk mengelola risiko, memastikan pencapaian tujuan, dan mematuhi peraturan. dengan memahami dan menerapkan komponen dan prinsip sistem pengendalian yang efektif, organisasi dapat mengevaluasi efisiensi operasional, kepatuhan, dan keandalan laporan keuangan sesuai peraturan.

Menurut Nila & Munari (2023), Protokol yang digunakan untuk memastikan dana desa yang dikelola secara akuntabel, efektif, dan sesuai dengan peraturan sistem pengendalian internal. Penemuan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adnyana (2022) serta Zeny, Yunika dan Hafifah (2020), yang menemukan bahwa sistem pengendalian internal adalah suatu mekanisme yang dibuat untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan.

Kerangka Teori dan Hipotesis

Kerangka Konseptual

Menurut Sugiyono (2019), Kerangka berpikir adalah sebuah konseptual dan keterkaitan antara variabel independen dan dependen pada digambarkan diagram berikut ini:



Gambar 2.2 Kerangka Berpikir

Pengaruh Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Transparansi adalah keterbukaan informasi yang diberikan pemerintah daerah kepada publik mengenai penggunaan anggaran mereka. Hal ini pun sesuai dengan prinsip transparansi yang ada pada teori yang menyatakan bahwa keterbukaan dalam pengelolaan anggaran yang memungkinkan penggunaan dana publik secara tepat dan legal (Ria, Taufeni & Azwir, 2021). Selain itu keterbukaan dalam menyampaikan informasi terkait pengelolaan dana kepada masyarakat (Nila Aulia & Munari, 2023).

Hal ini terdapat hubungan positif pada transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang dapat diinterpretasikan bahwa semakin tinggi tingkat transparansi dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan hubungan positif antara transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, hipotesis berikut dapat diajukan:

H1 : Transparansi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengaruh Kompetensi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut ian Taylor (2007), Kompetensi dalam pengelolaan keuangan merujuk pada keterampilan, pengetahuan dan kemampuan pegawai pemerintahan daerah dalam melaksanakan tanggung jawab pengelolaan keuangan. Selain itu, peningkatan kemampuan pejabat sesuai standar yang ditetapkan untuk bertanggung jawab dalam pengelola keuangan daerah (Artini & Putra, 2022; Melinda 2021; Ria, Taufeni & Azwir, 2021). Hal ini sesuai dengan penelitian Dwi Fitri & Riky Agung (2020), bahwa hubungan positif kompetensi yang tinggi dari aparatur pemerintah terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, hipotesis berikut dapat diajukan:

H2: Kompetensi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Sistem pengendalian internal yang efektif dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan karena dapat mengurangi kesalahan dan kecurangan serta peningkatan transparansi dan keandalan pelaporan keuangan. Untuk memastikan bahwa pengelolaan dana yang dilakukan secara efisien, efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, pemerintah menetapkan sistem pengendalian internal (Nila Aulia & Munari, 2023).

Terdapat hubungan positif antara akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan sistem pengendalian internal. Hal ini dapat membantu pemerintah daerah menjadi akuntabel dengan membuat laporan keuangan yang akurat dan dapat diandalkan serta mematuhi standar peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, pemerintah daerah dapat menerapkan sistem pengendalian internal yang kuat untuk memastikan bahwa anggaran yang dikelola dengan benar dan dilaporkan secara bertanggung jawab dalam pelaporan keuangan. Untuk itu dapat diajukan hipotesis berikut ini:

H3 : Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengaruh Transparansi, Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Akuntabilitas pengelolaan keuangan yang efektif dalam memberikan informasi kepada public untuk mendapatkan kepercayaan serta bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan dalam pengelolaan keuangan lengkap (Setia Mulyani & Setyo, 2020).

Menurut Ria, Taufeni & Azwir (2021), terdapat hubungan antara Transparansi, Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Penemuan ini sejalan dengan Nila Aulia & Munari (2023), menemukan bahwa hubungan antara Transparansi, Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk itu dapat diajukan hipotesis berikut ini:

H4 : Transparansi, Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

METODE

Penelitian ini mengumpulkan data melalui metode kuantitatif berupa kuesioner. Unit analisis terdiri dari karyawan badan pengelolaan keuangan dan aset daerah provinsi papua. Selain itu, metode pengambilan sampel purposive menggunakan standar yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk memenuhi tujuan studi. Analisis data yang digunakan untuk menghasilkan kesimpulan dari variabel dalam penelitian adalah analisis statistik dan analisis regresi berganda dengan pendekatan ordinary least squares (OLS). Pengujian hipotesis yang dilakukan dan hasil kesimpulan yang objektif dapat dipertanggungjawabkan secara statistik diperoleh dengan menggunakan program statistik IBM SPSS versi 23.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 4. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Transparansi	45	17	25	21.76	2.715
Kompetensi	45	21	35	30.84	3.548
Sistem Pengendalian Internal	45	18	35	30.13	4.470
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	45	32	45	41.00	4.028
Valid N (listwise)	45				

Sumber: diolah oleh SPSS, 2025

1. Hasil deskriptif standar deviasi transparansi adalah 2,715 menunjukkan bahwa responden atau objek penelitian data transparansi masih variasi kecil sedikit lebih rendah dibandingkan yang lain, sehingga masih dapat dikembangkan lebih baik.
2. Hasil standar deviasi kompetensi adalah 3,548 menunjukkan kemungkinan adanya beberapa individu dengan kompetensi sedikit lebih rendah, sehingga masih memerlukan pengembangan untuk meningkatkan kompetensi secara menyeluruh.
3. Hasil standar deviasi sistem pengendalian internal adalah 4,470 bervariasi yang cukup signifikan antara responden. sehingga dapat disimpulkan bahwa perlu adanya perhatian lebih lanjut untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan konsistensi penerapan sistem pengendalian internal di lingkungan yang diteliti.
4. Serta hasil nilai rata-rata tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan dalam penelitian ini tergolong tinggi 41,00 dan sebagian kecil variasi standar deviasi 4,028 yang mungkin memiliki perbedaan pengalaman atau pemahaman terhadap proses akuntabilitas.

Uji Validitas

Hasil Analisis uji validitas untuk butir pertanyaan tersebut valid karena transparansi, kompetensi, sistem pengendalian dan akuntabilitas pengelolaan keuangan kurang dari 0,50. Namun, jika nilai sig lebih dari 0,50 butir pertanyaan tersebut dianggap tidak valid. Hasil pengujian ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Variabel Transparansi (X_1)

Indikator (X_1)	Nilai Signifikansi	Keterangan
$X_{1.1}$	0,000	Valid
$X_{1.2}$	0,000	Valid
$X_{1.3}$	0,000	Valid
$X_{1.4}$	0,000	Valid
$X_{1.5}$	0,000	Valid

Sumber: diolah SPSS, 2025

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Variabel Kompetensi (X₂)

Indikator(X ₂)	Nilai Signifikansi	Keterangan
X _{2.1}	0,000	Valid
X _{2.2}	0,000	Valid
X _{2.3}	0,000	Valid
X _{2.4}	0,000	Valid
X _{2.5}	0,000	Valid
X _{2.6}	0,000	Valid
X _{2.7}	0,000	Valid

Sumber: diolah oleh SPSS, 2025

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Variabel SPI

Indikator (X ₃)	Nilai Signifikansi	Keterangan
X _{3.1}	0,000	Valid
X _{3.2}	0,000	Valid
X _{3.3}	0,000	Valid
X _{3.4}	0,000	Valid
X _{3.5}	0,000	Valid
X _{3.6}	0,000	Valid
X _{3.7}	0,000	Valid

Sumber: diolah SPSS, 2025

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan (Y)

Indikator (Y)	Nilai Signifikansi	Keterangan
Y.1	0,000	Valid
Y.2	0,000	Valid
Y.3	0,000	Valid
Y.4	0,000	Valid
Y.5	0,000	Valid
Y.6	0,000	Valid
Y.7	0,000	Valid
Y.8	0,000	Valid
Y.9	0,000	Valid

Sumber: diolah SPSS, 2025

Uji Reabilitas

Berdasarkan tabel 6, semua nilai Cronbach Alpha lebih dari 0,70 variabel dapat dianggap reliabel (Ghozali, 2018). Berdasarkan hasil data uji reliabilitas dapat disimpulkan reliabel karena nilai variabel independen dan dependen lebih dari 0,70 (Olivia & Sri Ayem, 2021). Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6. Uji Reliabilitas

Variabel	Jumlah Item	Nilai Cronbach's Alpha	Keterangan
Transparansi (X ₁)	5	0,861	Reliabel
Kompetensi (X ₂)	7	0,878	Reliabel
Sistem Pengendalian Internal (X ₃)	7	0,895	Reliabel
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	9	0,902	Reliabel

Sumber: diolah SPSS, 2025

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		45
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.64670122
Most Extreme Differences	Absolute	.123
	Positive	.121
	Negative	-.123
Test Statistic		.123
Asymp. Sig. (2-tailed)		.084 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Pengujian Normalitas satu sampel Kolmogorov-smirnov, dimana dalam penelitian data akan dianggap normal ketika nilai signifikan lebih tinggi dari 0,05. Oleh karena itu, Menurut Amalia (2020), hasil uji one-sample Kolmogorov-smirnov test menunjukkan Asymp. Sig (2-tailed) adalah **0,084**. Karena nilai signifikan lebih tinggi dari 0,05, Penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa data residual **berdistribusi normal**.

Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	15.207	3.669		4.145	.000		
	Transpransi	.598	.282	.403	2.118	.040	.291	3.440
	Kompetensi	.193	.223	.170	.865	.392	.272	3.677
	Sistem Pengendalian Internal	.226	.136	.251	1.669	.103	.465	2.149

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Hasil Uji Multikolinearitas akan menunjukkan bahwa tidak ada masalah multikolinearitas Jika **nilai**

toleransi lebih dari 0,100 dan vif kurang 10,00. Oleh karena itu, berdasarkan variabel independen yang memiliki **nilai toleransi lebih dari 0,100 dan vif kurang dari 10,00.** sehingga dapat disimpulkan bahwa **uji multikolinieritas sudah mengalami masalah multikolinieritas.**

Uji Heteroskedasitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15.055	2.483		6.063	.000
	Transpransi	-.359	.191	-.385	-1.880	.067
	Kompetensi	-.059	.151	-.082	-.387	.701
	Sistem Pengendalian Internal	-.175	.092	-.308	-1.903	.064

a. Dependent Variable: LN_RES

Berdasarkan hasil Uji Park, data heteroskedasitas dalam model regresi berganda tidak menunjukkan gejala heteroskedasitas jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Untuk itu berdasarkan data tersebut, maka variabel Transparansi menunjukkan nilai kontribusi yang signifikansi sebesar **0,067**, Variabel Kompetensi menunjukkan nilai kontribusi yang signifikansi sebesar **0,701** dan Variabel Sistem pengendalian internal menunjukkan nilai kontribusi yang signifikan sebesar **0,064**. Hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada gejala heteroskedastisitas dalam data ini. Sehingga asumsi uji heterokedasitas sudah terpenuhi, karena variabel independen memiliki nilai signifikan diatas 0,05.

Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.754 ^a	.568	.537	2.742	1.389

a. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Internal, Transpransi, Kompetensi

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Berdasarkan kriteria pengujian, model summary nilai durbin-watson pada penelitian maka nilai Durbin-Watson sebesar 1,3832, yang berada di antara -2 dan 2 artinya $-2 < 1,38 < 2$ sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada model regresi tersebut.

Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15.207	3.669		4.145	.000
	Transpransi	.598	.282	.403	2.118	.040
	Kompetensi	.193	.223	.170	.865	.392
	Sistem Pengendalian Internal	.226	.136	.251	1.669	.103

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Berdasarkan persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini, dapat ditarik disimpulkan sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_p X_p + \epsilon$$

$$Y = 15,207 + 0,598 + 0,193 + 0,226 + e$$

Interpretasinya :

1. Nilai konstanta (a) adalah 15,207.

Nilai ini membuktikan bahwa jika variabel independen transparansi, kompetensi dan sistem pengendalian internal tetap konstan, maka akuntabilitas pengelolaan keuangan memiliki nilai 15,207.

2. Nilai koefisien variabel transparansi bernilai positif 0,598.

Hal ini dapat berarti bahwa setiap adanya peningkatan pada transparansi 1%, berpotensi akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan sebesar 0,598.

3. Nilai koefisien variabel kompetensi bernilai positif 0,193.

Hal ini dapat berarti bahwa setiap adanya peningkatan pada kompetensi 1%, berpotensi akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan sebesar 0,193.

4. Nilai koefisien variabel sistem pengendalian internal bernilai positif 0,226.

Hal ini dapat berarti bahwa setiap peningkatan 1% dalam sistem pengendalian internal berpotensi meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan sebesar 0,226.

Uji Hipotesis

Uji Parsial (Uji t)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15.207	3.669		4.145	.000
	Transpransi	.598	.282	.403	2.118	.040
	Kompetensi	.193	.223	.170	.865	.392
	Sistem Pengendalian Internal	.226	.136	.251	1.669	.103

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Berdasarkan hasil uji-t, ditemukan bahwa variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen dengan nilai signifikansi < 0,05. Secara rinci, H1 menunjukkan bahwa variabel transparansi (X1) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,040 (< 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa transparansi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Sementara itu, H2 menunjukkan bahwa variabel kompetensi (X2) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,392 (> 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa kompetensi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Selanjutnya, H3 menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian internal (X3) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,103 (> 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian

internal juga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Dengan demikian, hanya variabel transparansi yang terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan, sedangkan kompetensi dan sistem pengendalian internal tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

Uji Simultan (Uji F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	405.779	3	135.260	17.992	.000 ^b
	Residual	308.221	41	7.518		
	Total	714.000	44			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

b. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Internal, Transpransi, Kompetensi

Berdasarkan kriteria pengujian, hasil analisis data **H4** menunjukkan bahwa transparansi, kompetensi dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan secara bersamaan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dengan nilai signifikan sebesar 0,000 (kurang dari 0,05).

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.754 ^a	.568	.537	2.742

a. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Internal, Transpransi, Kompetensi

Berdasarkan hasil analisis data pada model summary, diketahui bahwa variabel transparansi, kompetensi dan sistem pengendalian internal memberikan pengaruh masing-masing sebesar **53,7%** terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan. Terbukti dengan koefisien determinasi nilai adjusted R square sebesar 0,537. Variabel lain diluar penelitian juga memberikan pengaruh sebesar **46,3%**.

Pengaruh Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Transparansi meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. nilai koefisien regresi sebesar 0,598 satuan, nilai t-statistic sebesar 2,188 yang lebih besar dari t-tabel sebesar 1,96, dan tingkat nilai koefisien standar sebesar 0,049 yang lebih rendah dari 0,05.

Dalam teori keagenan (*agency theory*), faktor transparansi sangat penting dalam hubungan antara pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal pada pengelolaan keuangan. karena dalam hubungan ini sering terjadi informasi asymmetry atau ketidakseimbangan informasi, dimana agen memiliki aksesibilitas informasi data yang lebih lengkap dibandingkan prinsipal. sehingga kondisi ini dapat berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dalam tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur akuntansi.

Berdasarkan penelitian menurut Ria, Taufeni & Azwir (2021) mengatakan bahwa transparansi merupakan faktor yang berimplikasi positif dalam peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Nila Aulia & Munari (2023) mengemukakan bahwa transparansi adalah komponen penting yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Sehingga, hasil olah data ini dapat menunjukkan bahwa transparansi dapat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam keterbukaan, kejelasan dan akses informasi data laporan keuangan kepada publik yang transparan dan akuntabel dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prosedur.

Pengaruh Kompetensi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Kompetensi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi sebesar 0,198, nilai t-statistic 0,867 yang lebih rendah dari nilai t-tabel sebesar 1,96, dan tingkat koefisien standar yang lebih tinggi dari 0,05 yaitu 0,170 (imbiri, siti, & bill, 2018).

Kompetensi adalah kemampuan seseorang untuk melaksanakan tanggung jawab pekerjaan dengan menggunakan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja (Alfiana, Farah, Prames, 2022). Sehingga kompetensi mencakup berbagai aspek yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang optimal dalam konteks tertentu (Sugiyono, 2020). Dalam teori keagenan (agency theory), sangat berkaitan dengan faktor kompetensi dalam hubungan antara masyarakat atau pemilik dana sebagai prinsipal dan pengelola atau aparatur sebagai agen. karena dalam hubungan ini terdapat risiko asimetri informasi dan potensi konflik kepentingan. kompetensi penting agar agen mampu menjalankan tugasnya secara profesional yang bertanggung jawab.

Menurut penelitian M.Syarifudin (2020), kompetensi tidak selalu berpengaruh besar terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Namun penelitian Ria, Taufeni dan Azwir (2021), sulaiman dan sapor (2023), yang menemukan bahwa penerapan kompetensi meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang didukung oleh sistem tata kelola dan budaya organisasi. Sehingga perlu adanya penerapan kompetensi keterampilan seperti pelatihan dalam meningkatkan pengetahuan kompetensi secara optimal dalam akuntabilitas.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Sistem Pengendalian Internal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Fakta ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,226, nilai t-statistic 1,669 yang sedikit lebih rendah dari t-tabel yang sekitar 1,96, dan tingkat koefisien standar yang 0,251 lebih tinggi dari 0,05. Dalam Teori keagenan, sistem pengendalian internal dapat berfungsi dalam pengawasan untuk membantu mengurangi risiko agency problem yaitu asimetri dan konflik kepentingan. sehingga dapat membuat agen lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nila Aulia & Munari (2023), Zeny, Yunika & Hafifah (2020) yang menemukan bahwa lebih baik sistem pengendalian internal dalam instansi dapat membantu agen menjamin bahwa pengelolaan keuangan sesuai dengan prosedur akuntansi dirancang harus memberikan jaminan yang memadai dalam pengelolaan keuangan. Namun, adapun penelitian Adnyana (2022) serta Ratih Amelia dan Fefri Indra (2023), yang menunjukkan bahwa pengendalian internal tidak selalu signifikan secara parsial tergantung pada konteks organisasi, tingkat penerapan dan faktor pendukung lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian harus mengevaluasi sistem pengendalian internal agar akuntabilitas pengelolaan keuangan dapat dimaksimalkan.

Pengaruh Transparansi, Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Pada Variabel Transparansi, Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal dapat diterima memiliki dampak positif yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai signifikansi (p-value) uji F simultan 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan bahwa masing-masing dari tiga variabel independen dapat berkontribusi pada perubahan atau variasi variabel dependen.

Pada teori keagenan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat meningkat ketika pemerintah sebagai agen dapat memberikan informasi yang transparan, memiliki kemampuan pengetahuan dalam kompetensi yang memadai dan menerapkan sistem pengendalian internal yang kuat untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap prinsipal dan menjamin pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab dan akuntabel.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh ria taufeni dan azwir (2021) dan nila aulia dan munari (2023) yang menunjukkan bahwa transparansi, kompetensi dan sistem pengendalian internal dalam model regresi meningkatkan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Meskipun ada beberapa yang tidak berpengaruh signifikan, tetapi melalui uji simultan membuktikan bahwa ketiga variabel independen dapat berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan keuangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa transparansi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi pengungkapan informasi keuangan, semakin baik akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Sebaliknya, kompetensi dan sistem pengendalian internal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor kompetensi pegawai dan sistem pengendalian internal yang ada belum mampu secara optimal memperkuat praktik akuntabilitas dalam lingkungan pengelolaan keuangan daerah. Meskipun demikian, transparansi, kompetensi, dan sistem pengendalian internal secara simultan berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan, meskipun tidak semua variabel memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa rekomendasi dapat diajukan. Pertama, penelitian lanjutan sebaiknya melibatkan responden dari unit pengelola keuangan daerah lain di Provinsi Papua. Hal ini diperlukan untuk memberikan gambaran yang lebih baik tentang situasi dan memungkinkan generalisasi yang lebih luas. Kedua, ukuran sampel perlu ditingkatkan agar hasil penelitian lebih realistis dan memperkuat validitasnya. Ketiga, sebaiknya menggunakan wawancara atau observasi langsung daripada kuesioner saja untuk mengumpulkan data. Metode ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang komponen-komponen yang memengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan di pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, S., & Sapar, S. (2023). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparat, Sistem Keuangan Desa Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Luwu Timur. *Jurnal Pendidikan Dan Teknologi Indonesia*, 3(2), 81–93. <https://doi.org/10.52436/1.Jpti.278>
- Audia, U. N., & Mulyani, E. (2023). Pengaruh Transparansi, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Kepatuhan Undang-Undang Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(2), 691–706. <https://doi.org/10.24036/Jea.V5i2.680>
- Aulia Nislandi, N., Studi Akuntansi, P., Ekonomi Dan Bisnis, F., Pembangunan Nasional, U., & Timur, J. (N.D.). *Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Transparansi, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Sidoarjo* (Vol. 12, Issue 2).
- Devi, S., Bachri, S., Studi Akuntansi, P., & Ekonomi Dan Bisnis, F. (N.D.). *Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Add) (Studi Pada Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara)*.
- Dewi, N. F., Ferdous Azam, S. M., & Yusoff, S. K. M. (2019). Factors Influencing The Information Quality Of Local Government Financial Statements and Financial Accountability. *Management Science Letters*, 9(9), 1373–1384. <https://doi.org/10.5267/J.Msl.2019.5.013>
- Dillard, J., & Vinnari, E. (2019). Critical Dialogical Accountability: From Accounting-Based Accountability To Accountability-Based Accounting. *Critical Perspectives On Accounting*, 62, 16–38. <https://doi.org/10.1016/J.Cpa.2018.10.00>
- Grossi, G., Kallio, K. M., Sargiacomo, M., & Skoog, M. (2020). Accounting, Performance Management Systems And Accountability Changes In Knowledge-Intensive Public Organizations: A Literature Review And Research Agenda. In *Accounting, Auditing And Accountability Journal* (Vol. 33, Issue 1, Pp. 256–280). Emerald Group Holdings Ltd. <https://doi.org/10.1108/Aaaj-02-2019-3869>
- Herlina, R., Taufik, T., & Nasir, A. (2021). Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan

- Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi. *Journal Of Economic, Bussines And Accounting (Costing)*, 4(2), 419–433. <https://doi.org/10.31539/Costing.V4i2.1965>
- Hildansyah, I., Jamiluddin Nur, M., & Pauji, R. R. (N.D.). Ketua Kpk Dalam Bingkai Media Pada Kasus Korupsi Gubernur Papua Di Media Cnnindonesia.Com Dan Detik.Com. *Jurnal Common* |, 6. <https://doi.org/10.34010/Common>
- Laine, M., Tregidga, H., & Unerman, J. (N.D.). *Sustainability Accounting And Accountability Third Edition*.
- Molle, S. S., Manafe, H. A., & Perseveranda, M. E. (N.D.). *Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah)*. <https://doi.org/10.31933/Jimt.V4i3>
- Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(2), 281–298. <https://doi.org/10.25105/Mraai.V20i2.7894>
- Zeny Antika, Yunika Murdayanti, & Hafifah Nasution. (2020). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 15(2), 212–232. <https://doi.org/10.21009/Wahana.15.027>